



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 000.7.2.4/366/BAPPEDA/2024

TENTANG

PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan daerah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penetapan Proyek Strategis Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Mempawah Tahun 2025, perlu ditetapkan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Proyek Strategis Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025, dengan daftar Proyek Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal, 14 - 10 - 2024

Pj. BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 000.7.2.4/366/BAPPEDA/2024  
TENTANG  
PROYEK STRATEGIS DAERAH  
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN  
ANGGARAN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH  
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROYEK STRATEGIS DAERAH BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	SUMBER DANA	OPD
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
1	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Minum ( SPAM ) Jaringan Perpipaan	5.016.301.000	DAK	PUPR
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan Spesifikasi : Desa Sejegi,	21.673.600.000	DAU	PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			
3	Pembangunan Tangki septik minimal 50 KK skala individual di kawasan perdesaan	4.898.556.000	DAK	PUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan			

NO	PROYEK STRATEGIS DAERAH BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	SUMBER DANA	OPD
	Gedung			
	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
4	Pembangunan Polsek Mempawah Timur Jl. Antibar Spesifikasi : Kecamatan Mempawah Timur	1.000.000.000	DAU	PUPR
5	Gedung Aula Kecamatan Toho	1.200.000.000	DAU	PUPR
6	Rumah Dinas Bupati Jl. Gusti M. Taufik Kabupaten Mempawah Spesifikasi : Kecamatan Mempawah Hilir	30.000.000.000	DAU	PUPR
7	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kab. Mempawah	1.000.000.000	DAU	PUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan			
8	Toho - Sui. Pinggan	6.499.062.021	DAU	PUPR
	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan			
9	Jl. Sungai Pinggan - Ansiap (K1)	999.993.467	DAU	PUPR
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan			
10	Pulau Pedalaman - Kuala (K1)	19.619.907.000	DAK	PUPR
11	Jl. Amawang - Suak Barangan Dusun Pudak - Dusun Samantakin (K1)	999.993.467	DAU	PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai			
12	Sungai Air Hitam	1.000.000.000	DAU	PUPR
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Penetapan Daftar			

NO	PROYEK STRATEGIS DAERAH BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	SUMBER DANA	OPD
	Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
13	Pengadaan Tanah untuk Puskesmas (Desa Parit Bugis) Spesifikasi : Kecamatan Segedong (3 Paket)	1.000.000.000	DAU	PERKIMTAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			
14	Pembangunan gedung RS. Rubini Spesifikasi : Ruang Gizi	7.503.000.000	DAU	DINKES PPKB
15	Pembangunan gedung RS. Rubini Spesifikasi : Kamar Jenazah	3.663.000.000	DAK	DINKES PPKB
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
16	Belanja DAK Fisik Pembangunan Baru (sarana dan Prasarana) Laboratorium Kesehatan Masyarakat	18.000.000.000	DAK Labkesmas	DINKES PPKB
	<b>TOTAL</b>	<b>124.073.412.955</b>		

Pj. BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
BUNJAMIN  
NIP. 19760809 200604 1 009

